

# **METODOLOGI KEILMUAN PANCASILA: OPERASIONALISASI DAN INTEGRASI KEILMUAN PANCASILA DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

**Arqom Kuswanjono**

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Email: arqomk@ugm.ac.id

## **Abstrak**

*Pancasila seharusnya diperkenalkan sebagai sebuah produk budaya dengan pendekatan filosofis, bukan sebagai produk politik. Bagaimana hal tersebut dilakukan? Untuk menjawabnya, perlu bagi kita untuk memperhatikan secara serius metodologi apa yang dihadirkan. Metodologi adalah sebuah upaya seseorang (saintis, calon saintis/mahasiswa) untuk mencari "jalan" atau cara yang tepat melalui aktivitas-aktivitas ilmiah dan riset. Analoginya adalah kita bisa memiliki sebuah cara atau pendekatan, yaitu ketika memiliki pertimbangan tepat dan benar dalam memahami Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan nilai yang bersumber dari Pancasila (baik nilai dasar dan nilai praktis). Operasionalisasi dan integrasi ilmu pengetahuan memerlukan upaya pengamatan yang luas terhadap gejala-gejala pengalaman manusia, khususnya dalam performa aksi-aksi yang beragam baik dalam kapasitas sebagai individu maupun warga bangsa. Melalui penciptaan integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai Pancasila, upaya-upaya pembangunan karakter bangsa dengan sendirinya akan terealisasi.*

**Kata kunci:** Pancasila, keilmuan, pembangunan karakter.

## **Abstract**

*Pancasila should be introduced as a cultural product, not a political product, through philosophical approaches. How can that be done? To answer it, it is necessary for us to look carefully at a methodology which is used. The methodology is efforts of a person (scientist, scientist aspirant/students) to look for a right way in scientific activities. By analogy to it, we can have a way or an approach which is considered appropriate and correct in understanding Pancasila especially regarding to values that arise from Pancasila (basical and practical values). Operationalization and integration between sciences needs a wide range observation to symptoms of human experiences, particularly in performing va-*

*rious actions in his/her capacity as an individual and a member of nation. By creating an integrated science with values of Pancasila, efforts to build the nation's character will be realized by itself.*

**Keywords:** *Pancasila, scientific, and character building.*

---

## PENDAHULUAN

Paradigma Pancasila seharusnya bisa menjadi tipe metodologi ilmu yang khas Indonesia. Bahkan melalui paradigma Pancasila, diharapkan bisa menyelesaikan berbagai bentuk penyimpangan (anomali) dalam berbagai persoalan keilmuan yang selama ini gagal diselesaikan dengan ilmu-ilmu konvensional. Jacob (1987: 16) menegaskan, "Apabila Pancasila diajarkan dalam bentuk penataran, perkuliahan, diskusi dsb, maka sebagian orang akan mulai "bosan" karena banyak sekali "makanan" yang sama dan harus dimakan terus-menerus seumur hidup". Pernyataan ini tentu relevan dengan problematika Pancasila di perguruan tinggi dalam konteks kekinian. Pasca pengesahan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, secara eksplisit UU ini menyebutkan bahwa terkait dengan kurikulum nasional setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan mata kuliah Pancasila. Namun, karena kurangnya persiapan dan kurangnya kesiapan-kesiapan strategis maupun teknis pasca keluarnya UU tersebut, akhirnya justru menuai berbagai masalah. Tujuan dari sebuah pendidikan untuk menciptakan generasi bangsa yang mempunyai bekal kepribadian dan berkarakter Indonesia masih jauh dari harapan.

Apabila dilakukan jajak pendapat di kalangan peserta didik maka akan didapati kecenderungan tidak menyukai pendidikan Pancasila. Beberapa alasannya adalah pertama, pendidikan Pancasila kurang sesuai dengan minat studi utama peserta didik. Kedua, materinya tidak *up to date* bahkan terkesan *jadul*, hanya mengulang apa yang pernah mereka dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya. Ketiga, metode pembelajarannya yang kurang variatif dan inovatif sehingga menimbulkan kebosanan. Padahal, persoalan ini sebenarnya juga tidak dapat ditimpakan sepenuhnya kepada pengajar semata. Realitas di lapangan jumlah pengajar pendidikan Pancasila sangat terbatas, sehingga yang terjadi satu pengajar dapat mengajar banyak kelas atau

mengambil jalan pintas dengan menugaskan pengajar yang kurang berkompeten mengajar pendidikan Pancasila. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penambahan dan *up grading* bagi pengajar pendidikan Pancasila dan pelatihan untuk calon dosen pengajar pendidikan Pancasila. Persoalan ini tidak bisa diabaikan, sebab tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual-intelektual muda yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa.

Sudah saatnya melakukan peninjauan kembali terhadap metodologi pendidikan Pancasila terhadap peserta didik, dari yang bersifat politik ke pendekatan baru. Pancasila perlu diperkenalkan sebagai produk budaya dengan pendekatan falsafah, bukan semata sebagai produk politik. Bukankah bangsa Indonesia sudah melakukan “konsensus ideologi negara” dengan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena itu, Pancasila sebagai produk budaya harus diperkenalkan kepada peserta didik apa adanya, sebagai dasar negara yang sudah menjadi milik segenap bangsa. Bukan zamannya lagi Pancasila dipakai sebagai alat kekuasaan semata-mata, sebagai alat untuk memojokkan golongan lain yang dianggap anti-Pancasila hanya karena berseberangan pandangan dengan pemerintah. Dengan demikian, maka “konsensus ideologi atau dasar negara” dapat terus-menerus ditingkatkan sebagai perwujudan konsensus nasional yang makin solid, tanpa mengelakkan kenyataan bahwa dengan kebhinnekaan sebagai negara demokrasi, tidak mengubur isme-isme atau ideologi yang tumbuh dalam nilai-nilai Pancasila, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

## **METODOLOGI KEILMUAN PANCASILA**

Salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi masyarakat akademik dewasa ini adalah kemajemukan dan keberagaman dari ilmu itu sendiri. Spesialisasi ilmu pengetahuan semakin berkembang, padahal problem kehidupan semakin membutuhkan pendekatan yang multi-disipliner. Tidak ada ilmu yang secara sendiri mengatasi problem bahkan dalam ilmunya sendiri. Salah satu problem manusia di era modern

ini, menurut Jacob (1987: 34), dalam dunia yang dikuasai teknik, harga manusia dinilai dari tempatnya sebagai salah satu instrumen sistem administrasi kantor tertentu. Akibatnya manusia dinilai bukan sebagai pribadi tapi lebih dari sudut kegunaannya atau hanya dilihat sejauh ada manfaat praktisnya bagi suatu sistem. Nilai sebagai pribadi berdasar hubungan sosialnya, dasar kerohanian dan penghayatan hidup sebagai manusia dikesampingkan. Bila pengembangan ilmu dan teknologi mau manusiawi, perhatian pada nilai manusia sebagai pribadi tidak boleh kalah oleh mesin. Hal ini penting karena sistem teknokrasi cenderung dehumanisasi.

Ini berbeda dengan ilmu pengetahuan masa lalu yang lebih menunjukkan keekaannya daripada kemajemukan dan keberagaman. Seperti pada awal perkembangannya, ilmu pengetahuan berada dalam kesatuan filsafat. Proses perkembangan ini menarik perhatian karena justru bertentangan dengan inspirasi tempat pengetahuan itu sendiri, yaitu keinginan manusia untuk mengadakan kesatuan di dalam kemajemukan dan keberagaman gejala-gejala di dunia. Karena yakin akan kemungkinannya maka timbullah ilmu pengetahuan. Secara metodis dan sistematis manusia mencari azas-azas sebagai dasar untuk memahami hubungan antara gejala-gejala yang satu dengan yang lain sehingga bisa ditentukan adanya keanekaan di dalam kebhinekaannya. Namun dalam perkembangannya ilmu pengetahuan berkembang ke arah keserbamajemukan ilmu.

Mengapa spesialisasi ilmu semakin meluas? Makin meluasnya spesialisasi ilmu dikarenakan ilmu dalam perjalanannya selalu mengembangkan macam metode, objek, dan tujuan. Spesialisasi ilmu memang harus ada di dalam satu cabang ilmu, namun kesatuan dasar azas-azas universal harus diingat dalam rangka spesialisasi. Spesialisasi ilmu bisa membawa persoalan bagi ilmuwan sendiri dan masyarakat. Ada kalanya ilmu itu diterapkan dapat memberi manfaat bagi manusia, tetapi bisa sebaliknya merugikan manusia. Spesialisasi di samping tuntutan kemajuan ilmu juga dapat meringankan beban manusia untuk menguasai ilmu dan mencukupi kebutuhan hidup manusia. Seseorang tidak mungkin menjadi generalis, yaitu menguasai dan memahami semua ilmu pengetahuan yang ada (Sutaryo, 2007:

14). Dalam konteks Pancasila, persoalan spesialisasi dan generalisasi memunculkan beberapa pertanyaan: (a) apakah ada kaitan antara Pancasila dengan ilmu pengetahuan?; (b) dalam kondisi bagaimana pengembangan ilmu memerlukan pertimbangan Pancasila? Untuk menjelaskan permasalahan tersebut ada tiga tahap yang perlu ditempuh. Pertama, melihat kompleksitas permasalahan ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan manusia. Kedua, membicarakan dimensi moral atau etis serta kriterianya yang diambil. Ketiga, berusaha menyoroti beberapa pertimbangan sebagai semacam usulan jalan keluar dari permasalahan yang muncul dengan perspektif Pancasila.

Parsons (1971: 23) berpendapat bahwa untuk memelihara kelangsungan suatu masyarakat bangsa, di samping kemampuan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah diperlukan juga kemampuan untuk menjaga jati diri (*pattern maintenance*) dengan terus memelihara sistem nilai budaya yang ada. Lalu bagaimanakah bentuk metodologi Pancasila itu? Untuk menjawab hal itu, perlu melihat secara cermat, sebenarnya metodologi itu apa? Metodologi adalah upaya seseorang untuk mencari "jalan" atau cara yang tepat dalam suatu kegiatan ilmiah atau penelitian. Dengan analogi terhadap hal itu, maka perlu memiliki cara atau pendekatan yang dianggap tepat dan benar dalam memahami Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan nilai yang muncul dari Pancasila itu baik nilai dasar, instrumental maupun praksis. Berbagai pendekatan, atau metode dalam memahami Pancasila akan diuraikan dalam tulisan ini, yakni melalui pendekatan pemahaman, integrasi, dan operasionalisasi.

Metode pemahaman adalah metode yang lazim digunakan dalam bidang humaniora dan ilmu sosial. Tujuan metode pemahaman adalah untuk mencari makna tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang humaniora, sosial, seperti perilaku manusia, peristiwa sejarah, interaksi masyarakat dengan lembaga, interaksi individu dengan individu lainnya, benda artefak (benda peninggalan atau warisan budaya suatu masyarakat) yang masih ada, ritual masyarakat, kehidupan beragama, dan sebagainya. Metode pemahaman ini bersifat subjektif, artinya keterarahan seorang pengamat (dianggap sebagai subjek) terhadap apa yang dihadapinya (objek) menggunakan rasa

empatnya, kesadaran (rasionalitasnya) yang dipenuhi dengan berbagai nuansa yang menyertainya.

Sebagai contoh, seorang pengamat atau peserta didik ketika menyaksikan upacara bendera pada setiap tanggal 17 Agustus yang dilaksanakan di kompleks Makam Bung Karno di Blitar tentu akan tersentuh hatinya, ketika menyaksikan dan mendengarkan detik proklamasi itu dikumandangkan kembali. Pembacaan kembali teks Proklamasi itu sebenarnya ingin mengingatkan bahwa pada beberapa tahun yang lalu (17 Agustus 1945) bangsa Indonesia telah memproklamakan kemerdekaan negaranya. Hal itu juga untuk mengingatkan pada bahwa sejak detik itu bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka, bebas untuk menyongsong masa depannya. Pesan (*message*) itulah yang ingin disampaikan oleh para generasi lama kepada generasi baru melalui upacara 17 Agustus agar sekarang ini memaknainya dengan baik dan arif.

Bagaimana hubungan metode pemahaman tersebut dengan Pancasila? Pancasila sebagai pengetahuan yang bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia harus dipahami dengan lebih objektif dan rasional. Artinya, pemahaman itu harus dimulai dengan penelusuran secara historis atau mencari latar belakang mengapa pengetahuan tentang Pancasila itu muncul dan menjadi landasan Negara Indonesia. Latar belakang historis menjadi dasar lebih lanjut untuk mengkaji butir Pancasila. Pesan (*message*) yang sebenarnya berasal dari akar pandangan hidup masyarakat Indonesia dan butir Pancasila itulah yang harus dicari dan dikembangkan dan menjadi tugas generasi muda untuk memahaminya dengan konteks yang lebih relevan terutama pada kondisi sekarang ini.

Bagaimana metode tersebut mampu terintegrasi oleh Pancasila? Hal itu dapat dilakukan melalui kritik ideologi yang memiliki (mengemban) tugas untuk “membuka” kedok ideologis dari pemikiran pengetahuan yang berasal dari kesadaran masyarakat dan mengatasi penindasan ideologis yang ditujukan pada tatanan normatif dalam kehidupan sosial. Kritik ideologi yang dimaksudkan ini adalah upaya metodologis atau metode yang mencoba menggabungkan antara pemahaman filsafat dengan kehidupan sosial. Dalam studi filsafat,

maka kegiatan konseptual tersebut kadang disebut sebagai usaha manusia yang sifatnya transendental atau metafisis. Dengan demikian kegiatan konseptual adalah kegiatan rasionalitas seseorang dalam melihat di balik (di belakang) fenomena atau perilaku kongkret. Ide atau gagasan apakah yang muncul ketika mengkaji Pancasila? Untuk itu, ketika berusaha menggali Pancasila secara mendalam maka pendekatan teori kritis juga menawarkan atau memungkinkan melakukan upaya kritik (lazim disebut sebagai kritik ideologi). Metode kritik ideologi ini berusaha melihat bahwa realitas sosial sebagai fakta sosiologis dapat dipahami sebagai kegiatan yang sifatnya konseptual. Kegiatan konseptual adalah kegiatan pemikiran kritis manusia dalam melihat, dan mencari makna sesuatu di balik fakta yang sifatnya empiris atau kongkret. Kritik ideologi ada dua macam, yaitu: (1) melakukan kritik yang sifatnya transendental (konseptual) dengan menemukan syarat yang memungkinkan pengetahuan berada dalam diri subjek; dan (2) kritik imanen yang mencoba menemukan kondisi sosio-historis dalam konteks tertentu yang mempengaruhi pengetahuan manusia. Jadi dengan kata lain, kritik ideologi adalah pendekatan refleksi diri yang membebaskan pengetahuan manusia itu apabila jatuh dan membeku dalam aspek transendental dan imanen (Hardiman, 2003: 19).

Pemikiran pengetahuan yang berasal dari masyarakat dianggap sebagai cara berpikir masyarakat yang menekankan pola ideologis tertentu, yang belum tentu sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Kedok ideologis yang menekankan *status quo* masyarakatnya hendaknya dikritisi. Kedok ideologis semacam itu muncul dalam berbagai bentuk interaksi sosial. Dan atas nama Pancasila banyak berbagai kelompok menginginkan paradigma Pancasila diubah sesuai dengan keinginan kelompok tersebut. Untuk menghindari hal semacam itu perlu dipikirkan adanya kritik ideologi yang mendorong praksis kehidupan politik manusia.

Sebaiknya interaksi sosial baik dari pihak pemimpin negara terhadap masyarakat, maupun antarindividu atau masyarakat berdasarkan pada cara berpikir kritis dengan menekankan unsur emansipatoris. Pada saatnya nanti unsur tersebut membawa misi emansipatoris yang mengarahkan masyarakat Indonesia lebih rasional melalui

refleksi diri. Pancasila dapat menjadi media untuk merefleksi diri manusia Indonesia dalam menuju derap pembangunan di tengah masyarakatnya. Di tengah derap pembangunan dalam masyarakat, kontradiksi yang diakibatkan perubahan sosio-kultural tidak hanya menghasilkan kemajuan tetapi juga ketimpangan. Situasi ketidakadilan sosial menjadi suatu tantangan untuk diperbaiki dengan paradigma kritik ideologi yang menekankan adanya realitas sosial sesungguhnya bukannya utopia. Hal itu menjadi tugas para ilmuwan sosial, khususnya untuk membantu dan memberikan kontribusi intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **INTEGRASI KEILMUAN PANCASILA**

Perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 30 tahun 1990 mempunyai tujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian; mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi di Indonesia memiliki motto yang dikenal "Tri Dharma Perguruan Tinggi", yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian.

Dari tujuan dan motto tersebut, perguruan tinggi menjadi tempat pertemuan utama dari berbagai kelompok yang merupakan kenyataan dan simbol. Sebagai kenyataan, perguruan tinggi memang merupakan satu tempat yang nyata di mana berkumpul para intelektual dengan aktifitas ilmiahnya, apakah mereka masih mahasiswa atau sudah menjadi dosen. Sebagai simbol, perguruan tinggi dianggap sebagai lembaga paling modern dan penggerak pembaruan. Perguruan tinggi/universitas ialah satu pusat dengan peranannya menghasilkan pemimpin yang cocok di masa kini dan mempelopori modernisasi. Universitas membentuk kader-kader bangsa, yang menjadi "pabrik ahli", menjadi tempat riset dilakukan, dan tempat pengumpulan pengetahuan dan penambahan pengenalan ilmiah berdasarkan rasionalisasi Barat.

Perguruan tinggi di Indonesia mempunyai tiga fungsi, seperti yang tertuang dalam motto “Tri Dharma Perguruan Tinggi”, yaitu tempat pengajaran dan pendidikan, tempat penelitian ilmiah, dan sebagai pengabdian masyarakat. Namun, yang menjadi ciri khas di Indonesia ialah peranannya sebagai pengabdian kepada rakyat (*social engineering*).

Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pendekatan ilmiah untuk mempelajari Pancasila itu. Pertama, mengembangkan suatu teori ilmiah untuk mempelajari Pancasila, dimensi ini menyentuh aspek proses integrasi keilmuan dan metodologi. Kedua, mengembangkan teori-teori ilmiah dengan Pancasila sebagai landasannya, dimensi ini menyentuh aspek substansi. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, ruang lingkup pemikiran akademik menurut Pranarka (1983: 27) adalah sebagai berikut.

- 1) Pengolahan ilmiah mengenai Pancasila, adanya atau eksistensi objektif Pancasila; Pancasila sebagai data empiris, yaitu sebagai ideologi, dasar Negara, dan sumber hukum yang terjadi di dalam sejarah. Sasaran ini dilakukan dengan penelusuran ilmiah terutama dengan menggunakan disiplin sejarah.
- 2) Mengungkapkan ajaran yang terkandung dalam Pancasila, yaitu mempelajari faktor-faktor obyektif yang membentuk adanya Pancasila. Penelusurannya dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu kebudayaan, termasuk di dalamnya ethnologi, antropologi, sosiologi, hukum, bahasa, dan ilmu kenegaraan. Dengan menggali faktor-faktor yang ikut membentuk perkembangan pemikiran mengenai Pancasila, dapat pula diungkapkan isi maupun fungsi Pancasila secara analitis.
- 3) Renungan reflektif dan sistematis mengenai Pancasila yang sifatnya diolah dengan keyakinan-keyakinan pribadi mengenai kebenaran-kebenaran yang sifatnya mendasari. Jenis pendekatan ketiga ini adalah kegiatan intelektual yang dilakukan dalam rangka filsafat atau teologi. Perbedaannya adalah renungan teologis dilaksanakan berdasarkan kepada wahyu yang diimani, sedangkan filsafat renungan mendasar mengenai Pancasila dilaksanakan atas dasar keyakinan pemikiran dan pengalaman manusiawi.
- 4) Studi perbandingan ajaran Pancasila dengan ajaran lain. Kegiatan

ini dapat dilakukan dalam rangka pemikiran filosofi, teologi, atau kegiatan ilmiah. Namun masing-masing mempunyai metodologinya sendiri-sendiri. Studi perbandingan ini mempunyai persyaratan yang banyak. Ajaran-ajaran Pancasila maupun ajaran lain diselami terlebih dahulu, dan baru kemudian dibandingkan. Di dalam studi seperti ini masing-masing ajaran berkedudukan sebagai *normans et normata* satu dengan yang lain.

- 5) Pengolahan ilmiah mengenai pelaksanaan Pancasila, yaitu masalah pelaksanaan atau operasionalisasinya. Pemikiran akademik itu dapat bergerak dalam ruang lingkup *das sain* maupun *das sollen*. Dalam kaitan dengan pemikiran akademis itu, baik ilmu filsafat maupun teologi dapat mempunyai fokus kepada ruang lingkup kenyataan seperti adanya ataupun kepada ruang lingkup pelaksanaan praktis.

Pendidikan integrasi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya, baik aspek kognisi (cipta), afeksi (rasa) dan konasi (karsa)-nya sesuai dengan nilai-nilai integritas (keutuhan moralitas) (Ali Rif'an: 2012). Adapun yang harus diperhatikan dalam upaya membangun integrasi keilmuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan pendidikan Pancasila sebagai ilmu yang penting dan menyenangkan dengan memperbaiki (evaluasi) problem-problem yang dihadapinya.
- 2) Transformasi dari pengajaran menjadi pendidikan, dari pengajar menjadi pendidik, dari transfer ilmu menjadi penanaman nilai, dari teoritik ke praktik.
- 3) Penerapan sistem *among* (Ki Hadjar Dewantara) *asah, asih, asuh* (*ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*) artinya harus ada keteladanan melalui pemberian semangat dan motivasi.
- 4) Pengembangan ranah kognitif, afektif, konatif dan integritas nilai.
- 5) Pengembangan *multiple intelligence* (intelektual, emosional, sosial, spiritual)
- 6) Pendidikan Pancasila sebagai *genetifus objectifus* sekaligus *genetifus*

*subjektifus*, sebagai objek kajian sekaligus sebagai cara pandang. Dalam konteks pendidikan integritas, pendidikan Pancasila ditempatkan sebagai *genetifus subjektifus*, yakni misalnya mengkaji masalah korupsi dari perspektif Pancasila atau secara tematik mewarnai seluruh pembelajaran.

## **OPERASIONALISASI PANCASILA DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

Keragaman nilai dalam Pancasila merupakan modal dasar pendidikan karakter, sehingga tidak perlu lagi mencari-cari bentuk atau model pendidikan karakter lain, karena basis kekuatan karakter bangsa telah dimiliki. Pendidikan dianggap sebagai tempat yang strategis untuk penyemaian pendidikan karakter. Berangkat dari hal tersebut, bagaimana kemudian nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan sampai kepada masyarakat umum. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan kondisi dan iklim yang memungkinkan segenap lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu. Itu dapat terlihat dalam perilaku yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar jargon/slogan untuk mencapai keinginan pribadi dengan mengajak orang lain mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sementara perilaku sendiri jauh dari nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Tahun 2011, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang: Kementerian Pendidikan Nasional) mengeluarkan buku kecil berjudul *"Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter"*. Dalam pengantar buku tersebut, Kabalitbang Kemmendiknas menulis, *"Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945."*

Oleh sebab itu, merealisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesungguhnya dapat dilakukan melalui cara-cara berikut ini.

- 1) Aktualisasi Pancasila secara objektif, yaitu melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya.
- 2) Aktualisasi Pancasila secara subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, warga negara, dan penduduk. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif sangat ditentukan oleh kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila.
- 3) Memiliki kemampuan analisis, berpikir rasional, santun, dan bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 4) Memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
- 5) Mampu meyakini dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila sebagai ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk (Bhinneka Tunggal Ika).
- 6) Mampu mengembangkan nilai-nilai dan etika Pancasila dalam realitas kehidupan.
- 7) Memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasila yang memiliki komitmen atas kelangsungan hidup dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan hal di atas, ketentuan yang dinyatakan dalam PP No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- 3) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh anggota sivitas akademik.

Oleh karena itu, merujuk pada ketentuan di atas maka tugas penting dan berat yang diterima kalangan perguruan tinggi adalah menciptakan masyarakat Indonesia baru yang didasarkan pada Pancasila. Perguruan tinggi melalui kajian ilmiah, mimbar akademik yang bebas, budaya akademik, dan berpikir rasional objektif dengan menggunakan metodologi ilmiah dalam kerangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, akan mempunyai peluang yang sangat besar untuk berperan serta sebagai kekuatan moral (*moral force*) untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merespon sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan karakter, terutama melalui pendidikan Pancasila, harus diupayakan adanya inovasi pendidikan karakter. Inovasi kiranya bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan. Misalnya, pendidikan Pancasila dilakukan secara terintegrasi ke dalam semua bidang keilmuan/mata kuliah. Integrasi yang dimaksud meliputi pemuatan nilai-nilai ke dalam substansi pada semua bidang keilmuan/mata kuliah dan pelaksanaan kegiatan akademik yang memfasilitasi dipraktikkannya nilai-nilai dalam setiap aktivitas di dalam dan di luar kelas. Selain itu, pendidikan Pancasila juga diintegrasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik. Misalnya, kegiatan kemahasiswaan/organisasi mahasiswa.

Dari berbagai inovasi di atas yang paling penting dan langsung bersentuhan dengan aktivitas pembelajaran sehari-hari adalah pengintegrasian nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter dalam proses akademis. Pengintegrasian pendidikan karakter melalui proses akademis menjadi salah satu model yang banyak diterapkan. Model ini ditempuh dengan paradigma bahwa semua civitas akademika adalah pendidik karakter (*character educator*). Perlunya inovasi dalam pendidikan Pancasila merupakan kebutuhan bangsa di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Pendidikan bukan semata mengembangkan intelektualitas, tetapi juga harus menyentuh kepribadian dengan pen-

didikan karakter bangsa. Karena itu pendidikan berinovasi dalam pengajaran, dengan penekanan berpikir secara lokal dan bertindak secara global, dalam pendasaran ilmu untuk kepentingan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Pendidikan berinovasi didasarkan pada metode pengajaran, bahan pembelajaran, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga pengajar, dalam menciptakan pendidikan dialogis, yang membangun hubungan kesetaraan antara para pengajar dan para peserta didik.

Merunut pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (5), standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Karena itu, materi pembelajaran pendidikan berinovasi dalam Pendidikan Pancasila memiliki standar isi yang disesuaikan bagi usia peserta didik dan jenjang pendidikan. Namun dalam kehidupan Perguruan Tinggi, standar isi sebagai materi pembelajaran, peserta didik membangun kreativitas untuk komunikasi pendidikan dalam mencermati suatu perubahan ranah publik baik secara lokal dan global. Pendidikan nasional diharapkan dapat mengembangkan jiwa merdeka, pikiran merdeka, dan tenaga merdeka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menekankan semangat identitas ke-Indonesia-an.

## **SIMPULAN**

Pancasila harus diperkenalkan sebagai produk budaya dengan pendekatan filosofis, bukan semata produk politik. Operasionalisasi dan integrasi keilmuan yang mampu menguatkan karakter kebangsaan dengan bekal metodologi keilmuan Pancasila sangat diperlukan. Metodologi adalah "jalan" atau cara yang tepat dalam kegiatan ilmiah atau penelitian. Dengan analogi itu, maka akan didapatkan cara atau pendekatan yang dianggap tepat dan benar dalam memahami Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan nilai yang muncul dari Pancasila (nilai-nilai dasar dan nilai-nilai praktis). Operasionalisasi dan integrasi antara ilmu perlu dilakukan melalui upaya untuk mengamati

berbagai gejala yang dialami oleh manusia, khususnya dalam melakukan berbagai tindakan dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu, dalam kehidupan negara-bangsa. Dengan menciptakan ilmu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila, upaya untuk membangun karakter bangsa akan terwujud dengan sendirinya.

Pendidikan Pancasila di era reformasi ini memerlukan inovasi dalam proses akademis secara khusus, dan secara umum inovasi pendidikan berlaku bagi semua pengajaran disiplin ilmu. Dengan inovasi pendidikan, diharapkan pengajar dan peserta didik dapat memahami situasi yang berkembang dan menghasilkan nuansa akademik yang berkarakter. Nuansa berkarakter tersebut dalam pendidikan Pancasila harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan personalitas yang berbekal semangat identitas dan pemikiran ke-Indonesia-an.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Parsons, Talcott, 1970, *Social Structure and Personality*, A Free Press, London.
- Jacob, T., 1987, *Manusia, Ilmu dan Teknologi: Pergumulan Abadi dalam Perang dan Damai*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Parsons, Talcott, 1971, *The System of Modern Societies*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, N. J.
- Pranarka, A. M. W., 1983, *Sejarah Perkembangan Pemikiran tentang Pancasila sebagai Ideologi, Dasar Negara dan Sumber Hukum: (Suatu Studi Eksplorasi)*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Rif'an, Ali, 2012, "Korupsi dan Pendidikan Integritas", Artikel pada harian Republika yang dimuat pada 8 Februari 2012.
- Sutaryo, 2007, *Sistem Pendidikan Nasional untuk Membangun Peradaban Indonesia yang Dijiwai Nilai-Nilai Pancasila*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Suwarno, 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.